

**PELANGGARAN YANG DITEMUKAN  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN  
LAPORAN PENINDAKLANJUTANNYA  
TAHUN 2021**

| NO | Jenis Pelanggaran                                            | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hak pakai tanah Untan                                        | Untan memiliki tanah yang pakai oleh beberapa pihak diaman hak pakai tersebut harus ditinjau ulang. Hak pakai luas tanah 2,629,204 m <sup>2</sup> tersebut menurut peraturan sudah sampai batas maksimum.                                                                                                | Hak pakai tanah harus ditinjau ulang mengingat Untan sebagai PTN BLU.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Hak pakai tanah sekitar Bundaran Tugu Digulis                | Hak pakai tanah sekitar bundaran Tugu Digulis berdasarkan Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura telah lewat tanggal jatuh tempo yaitu lima tahun.                                                                                                        | Perjanjian Kerja Sama berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja Sama, dapat diperpanjang Kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.                                                                                                                                                          |
| 3. | Selisih dan perbedaan saldo akhir bulan dan saldo awal bulan | Universitas Tanjungpura pada tahun anggaran 2021 menerima alokasi anggaran sebesar Rp429.672.828.000,02 sesuai DIPA revisi ke 04 nomor SP DIPA-023.17.2.677517/2921 tanggal 28 September 2021. Realisasi belanja negara pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp272.690.774.358,00 atau mencapai 55,70%. | Dilakukan penyesuaian selisih tersebut terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.                                                |
| 4. | Pemanfaatan Aset : Aset Dikerjasamakan/ Masalah              | Untan memiliki aset yang dikerjasamakan sebanyak 19 aset berupa sewa tanah/lahan dan sewa gedung. Hingga akhir tahun 2021, dari 19 aset tersebut masih belum ditentukan jangka waktu sewa baru dan tarif baru.                                                                                           | Dari 19 aset tersebut ada empat penyewa yang sudah ditentukan jangka waktu sewa dan tarif baru atas aset dikerjasamakan yaitu BNI dengan jangka waktu sewa baru tiga tahun dan tarif sewa baru pertahun Rp636.142.500; BNI jangka waktu sewa baru tiga tahun dan tarif sewa baru pertahun RP306.000.000; PD Makmur jangka waktu sewa baru |

| NO | Jenis Pelanggaran            | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (tahun belum ditentukan) dan tarif sewa baru pertahun Rp77.500.000; PT Duta Cipta Bina Sarana jangka waktu sewa baru tiga tahun dan tarif sewa baru per tahun Rp50.000.000.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Pendapatan Kerja Sama        | UNTAN memperoleh pendapatan kerja sama berupa 217 KSM. Hingga akhir tahun 2021 dari 217 KSM tersebut sebanyak 167 KSM dengan nilai kerja sama Rp32.511.847.987. Sementara hasil audit sampai dengan tanggal 5 Februari 2021, masih terdapat 50 KSM belum diperoleh informasi nilai rupiahnya.                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan dibuat kebijakan Pimpinan terkait optimalisasi pemanfaatan BMN dan pengelolaan PNBPN secara terintegrasi di lingkungan Universitas Tanjungpura.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran Badan Pengelola Pengembangan Usaha (BPBU) dalam melakukan penilaian dan penetapan tarif penyewaan aset yang berada di lingkungan Universitas Tanjungpura.</li> </ol> |
| 6. | Pengelolaan Pemanfaatan Aset | Bedasarkan hasil audit yang dilaksanakan terhadap pengelolaan PNBPN dilingkungan Universitas Tanjungpura (Untan) tahun 2021 melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara diperoleh fakta bahwa Untan memiliki taman dan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Masyarakat umum dapat menggunakan fasilitas tersebut diatas dengan tidak dipungut bayaran, padahal taman dan hutan Arboretum tersebut dapat dimanfaatkan oleh Untan sebagai salah satu sumber dana pendapatan karena memiliki potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak. | Mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02.2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga secara komperhensif kesemua unit/fakultas di lingkungan Untan.                                                                                                                                              |
| 7. | Stock Opname                 | Stock opname belum didukung dengan dokumen yang lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatkan pemahaman kepada pengelola barang atau BMN dilingkungan Untan terhadap pentingnya mentaati Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.05/2020.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO  | Jenis Pelanggaran                              | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Perencanaan Investasi Jangka Pendek            | Pengelolaan PNBPN dalam melaksanakan investasi jangka pendek belum memuat persyaratan yang dianjurkan oleh PMK 129/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatkan kesadaran kepada pengelola PLBP terhadap pentingnya melaksanakan kegiatan investasi yang mengacu pada peraturan Menteri keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum.                                   |
| 9.  | Belanja Modal LS                               | <p>1.. Pada tahap perencanaan. Saat identifikasi kebutuhan, permasalahan yang seringkali muncul adalah identifikasi kebutuhan kurang memperhatikan kebutuhan riil di lapangan</p> <p>2. Pada tahap pemilihan penyedia, masih ada kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan perundangan</p> <p>3. Pada tahap penyelesaian pembayaran, dokumen atau bukti pembentuk harga tidak disediakan oleh penyedia secara lengkap sehingga menyebabkan tim audit kesulitan meyakini kewajaran harga yang ditawarkan</p> <p>4. tahap distribusi kepada pengguna akhir atau end user. Permasalahan yang lain adalah barang hasil pengadaan pendistribusian tidak ada bertepatan waktu</p> <p>5. masih terdapat beberapa kegiatan dengan output sama tapi kegiatannya dipecah.</p> | Sampai dengan laporan dibuat, audit belanja modal LS belum selesai dilaksanakan. Tim SPI masih melaksanakan proses audit.                                                                                                                             |
| 10. | Belanja Modal LS (Pemecahan Kontrak > 200juta) | Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pejabat pembuat komitmen, Pengelola Keuangan, bahwa pekerjaan pengadaan Cleaning Service pada beberapa fakultas dibuat pemaketan masing-masing menjadi dua. Paket pekerjaan dan dengan cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |

| NO  | Jenis Pelanggaran                 | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | membayar setiap bulan dengan tujuan untuk menghindari pelelangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | Belanja Modal > 200 Lelang        | <p>1. Persyaratan peserta lelang yang sangat mudah sehingga menimbulkan fenomena pinjam bendera yang membuat pekerjaan menjadi rendah mutunya.</p> <p>lelang membuat pekerjaan menjadi tidak selesai tepat waktu karena kontraktor melakukan efisiensi di sdm nya.</p> <p>2. Penawaran yang rendah juga menimbulkan perubahan pada pekerjaan sehingga kontrak di addendum dan pekerjaan akan berubah dari desain awalnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan Lelang dengan beban Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang memerlukan waktu terbatas.</p> <p>4. Pemecahan Kontrak Lelang terkait Revisi Anggaran</p> <p>5. Nilai pekerjaan yang antara 200 juta s.d. 400 juta tidak efisien karena membutuhkan waktu yang sama dengan nilai tender yang diatas 1 M.</p> <p>6. Lelang Dilakukan pada akhir tahun Anggaran, sehingga harus berpacu dengan waktu</p> | Memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan (unit layanan pengadaan) untuk selalu mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 12. | Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | Sampai dengan tahun 2021 Untan memiliki 54 KDP dengan total nilai KDP Rp146.925.966.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap konstruksi/banguna-bangunan yang masuk kategori Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan mengkoordinasikannya dengan dewan pengawas BLU.                                                               |
| 13. | Penelitian dan PKM                | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNTAN mencakup dana yang bersumber dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Membuat surat edaran atau regulasi terkait dengan kewajiban setiap pelaksana penelitian dan                                                                                                                                                           |

| NO  | Jenis Pelanggaran | Gambaran Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | PNBP UNTAN dan dari BOPTN melalui kompetisi nasional. Permasalahan Penelitian dan PKM dengan sumber dana DIPA UNT AN adalah (1) Output penelitian/PKM belum sesuai target atau belum dapat dicapai dalam 1 tahun, (2) masih terdapat laporan penelitian tidak dilengkapi dengan LPJ Keuangan, (3) Sebagian besar outcome belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara permasalahan yang bersumber dari BOPTN yaitu: (1) Penerima terbatas pada yang memenuhi persyaratan dan lolos kompetisi nasional, (2) jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah pengusul, (3) output penelitian/PKM belum sesuai target, (4) pengusul belum menjalin kerjasama dengan mitra industri. | pengabdian kepada masyarakat untuk membuat capaian kinerja terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Kinerja Utama     | Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi UNTAN pada tahun 2021 antara lain:<br>1)Program Remunerasi, yang menyebabkan seluruh honorarium penunjang kegiatan bagi ASN dialihkan menjadi Remunerasi, yang nilainya maksimal 45% dari Pagu anggaran yang ada; 2) Kegiatan yang gagal tender dikarenakan desain perencanaan tidak optimal serta tidak jadi kontrak dikarenakan tidak cukup waktu untuk penyelesaiannya, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan                                                                                                                                                            | Langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain: 1) Menggeser alokasi remunerasi untuk pembayaran honorarium semester I. Alokasi honorarium semester 1 sama seperti pembayaran honorarium tahun-tahun sebelumnya. Berlaku untuk dosen dan tenaga PNS, tenaga honorarium, maupun tenaga dosen luar, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa honorarium dapat dibayarkan jika telah melebihi BKD, diluar Tupoksi, dan mengacu pada ketentuan dalam SBM; 2) Mengintensifkan proses pemilihan penyedia, baik melalui tender cepat dan E-Purchasing, dan penunjukkan langsung; |

| NO | Jenis Pelanggaran | Gambaran Pelanggaran | Tindak Lanjut Pelanggaran                                                                              |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                      | 3) mengintensifkan koordinasi dengan pihak yang terkait; dan 4) melaksanakan monev realisasi anggaran. |

Pontianak, 22 Februari 2022

SPI UNTAN



Dr. Witarso, M.Si, CRA, CRP, CRMP, CFrA